



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI UMUM DI
KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

Adhitya Putra Nugraha

D2A607001

Dosen Pembimbing

- 1. Ibu Hesti Lestari**
- 2. Bapak R. Slamet Santoso**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI UMUM DI KOTA SEMARANG

ABSTRAKSI

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu indikator pencapaian kesejahteraan penduduk, namun peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia sehingga menimbulkan peningkatan angka pengangguran, atau dengan kata lain di tempat yang jumlah penduduknya tinggi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Transmigrasi. Adanya Transmigrasi masyarakat diharapkan lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor dengan implementasi kebijakan transmigrasi umum di Kota Semarang. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, serta Weimer dan Vinning. Tipe penelitian eksplanatori dengan sampel 48 responden, pengujian hipotesis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi dengan implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan $Z_{hitung} (5,11) > Z_{tabel} (1,96)$ pada taraf signifikan

5%. Hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan implementor dengan implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan Z_{hitung} (4,57) > Z_{tabel} (1,96) pada taraf signifikan 5%. Hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor dengan implementasi kebijakan yang diperoleh dari perhitungan χ^2_{hitung} (78,817) > χ^2_{tabel} (5,99) pada taraf signifikan 5%.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Kemampuan Implementor dan Implementasi Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Sebagai modal dasar, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sementara itu jumlah penduduk yang besar bukan jaminan keberhasilan suatu pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru bisa menjadi bencana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain itu juga akan dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi generasi yang akan datang.

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu indikator pencapaian kesejahteraan penduduk, namun peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia sehingga menimbulkan peningkatan angka pengangguran, atau dengan kata lain di tempat yang jumlah penduduknya tinggi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pencapaian kesejahteraan harus diikuti dengan pemerataan penduduk, karena dengan pemerataan penduduk dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh peluang kerja yang lebih memadai.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Transmigrasi. Adanya Transmigrasi masyarakat diharapkan lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi, dinyatakan bahwa sasaran penyelenggaraan Transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi dipermukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Di dalam masa transisi ini, Program Transmigrasi dihadapkan persoalan yang dilematis. Di satu sisi masih dirasakan sebagai kebutuhan dan di sisi lain ditanggapi secara ragu-ragu. Dirasakan sebagai kebutuhan, karena beberapa daerah beranggapan bahwa transmigrasi merupakan jalan pintas untuk memicu dan memacu pertumbuhan daerah, tetapi ditanggapi secara ragu-ragu karena kurang adanya keterkaitan secara fungsional antara perpindahan transmigrasi dengan kepentingannya.

Terlepas dari silang persepsi terhadap Program Transmigrasi, realitas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan minimal dua hal pokok. Pertama, bagi daerah-daerah yang menyadari bahwa potensi sumber daya yang dimiliki tidak akan bermakna tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Bagi daerah-daerah seperti ini tentu berharap agar Program Transmigrasi dilanjutkan. Kedua, bagi daerah-daerah yang menyakini bahwa kemampuan yang dimiliki masyarakatnya hanya sebatas mengolah lahan secara Tradisional. Bagi daerah-daerah seperti ini, transmigrasi dianggap cara yang tepat untuk memperoleh sumber pendapatan tetap melalui penyediaan lahan sesuai kompetensinya.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap implementasi kebijakan Transmigrasi Umum di Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kemampuan implementor terhadap implementasi kebijakan Transmigrasi Umum di Kota Semarang.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor terhadap implementasi kebijakan Transmigrasi Umum di Kota Semarang.

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Hartono (dalam Horsio, 2007:47) berpendapat bahwa Implementasi dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan juga menekankan pada suatu tindakan yang difokuskan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Riant (2004: 158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Hessel (2003: 1-2) mengatakan Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluan sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan – dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Definisi ini baru memutuskan tindakan yang akan dilaksanakan, belum pada tahap pelaksanaan kebijakan.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2006: 99-101), ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristi para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Weimer dan Vinning (dalam Subarsono, 2006:103), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu :

1. Logika kebijakan

Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akan dan mendapat dukungan teoritis.

2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.

3. Kemampuan Implementor

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan ketrampilan dari para implementor.

Pendekatan Implementasi

Menurut Riant (2004: 165) pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top bottomer*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar.

Top-down:

- Asumsi: melihat proses kebijakan sebagai rangkaian/rantai perintah ketika pemimpin politik mengartikulasikan preferensi kebijakan yang harus dilaksanakan birokrasi (keputusan => karakteristik birokrasi =>

plan => implementation => target group).

- Syarat: arah/tujuan/sasaran kebijakan jelas (riset kebijakan), mandat legal (regulasi ketat).
- Prioritas: menekankan pada bagaimana pelaksana kebijakan dapat membuat pekerjaannya lebih efektif.

Pada pendekatan Top-down, terbentuknya suatu kebijakan berasal dari keputusan pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat kemudian di turunkan kepada pejabat dibawahnya untuk dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang baik dari pemerintah.

Bottom-up:

- Lahir sebagai kritik atas top-down, fokus pada level bawah implementasi (masalah dan pemecahannya).
- Diawali dari semua pihak (stakeholders) yang dipengaruhi/mempengaruhi kebijakan (pasif/aktif).
- Menguji tujuan, strategi, jaringan, dan pendanaan.
- Keuntungan: perhatian langsung pada hubungan formal & informal jaringan pelaksanaan kebijakan.
- Hasil studi: umumnya implementasi kebijakan rendah di komitmen dan skill pelaksana.

Pada pendekatan Bottom-up, suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah namun dilaksanakan oleh masyarakat, keberhasilan suatu kebijakan tergantung dari tanggapan masyarakat itu sendiri,

Pendekatan Implementasi Kebijakan Yang Digunakan

Mix/Campuran

- Adanya perbedaan top-down dengan bottom-up, cenderung lebih bermakna kalau dikombinasikan (sabatier: koalisi)
- lebih dari sekedar bottom-up dan top-down, melihat implementasi kebijakan sebagai kesatuan alat (instrumen) bagi kebijakan: studi tentang pilihan rasional
- Pendekatan instrument-choice pemerintah untuk mengkonkritkan desain : diawali dari observasi, diperluas, melibatkan beberapa teknik pemetaan masalah (policy tools) => 1) market, 2) family or community, 3) regulation, public enterprise, or direct provision, 4) mixed

Transmigrasi Umum merupakan jenis transmigrasi yang pelaksanaannya diperlukan adanya dukungan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan pemerintah yang mampu melaksanakan tugasnya dan menyediakan fasilitas yang diperlukan, jadi perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2006 : 138).

Ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang *memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan*. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya (Riant, 2004: 179).

“Tepat” yang kedua adalah “tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (Riant, 2004: 179-180).

“Tepat” ketiga adalah “tepat target”. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah tergetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya (Riant, 2004: 180-181).

“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan (Riant, 2004: 181).

Dengan mengikuti transmigrasi umum, berarti masyarakat mendukung pelaksanaan transmigrasi umum.

Di dalam penelitian ini, keberhasilan implementasi transmigrasi umum diukur dengan indikator :

- a. Tingkat kesesuaian prosedur pelaksanaan implementasi kebijakan transmigrasi umum.
- b. Tingkat ketepatan tujuan dan sasaran implementasi kebijakan transmigrasi umum.
- c. Tingkat dukungan transmigran.

1.3.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dengan cara yang berbeda-beda. Kondisi sosial ekonomi memiliki peran penting dalam tercapainya implementasi kebijakan.

Lawang (1978:48) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Pendapatan adalah semua yang diterima seseorang selama satu bulan atau satu tahun yang dapat dinilai secara ekonomis. Cara yang ditempuh oleh individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari kemampuan dan cara yang ditempuh oleh individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan adanya perbedaan hasil atau pendapatan yang diperoleh untuk masing-masing individu.
- b. Kekayaan adalah pemilikan modal, uang, atau benda fisik dan apa saja yang dimiliki seseorang.
- c. Pekerjaan adalah sumber mata pencaharian seseorang. Setiap individu membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya pekerjaan sebagai mata pencaharian akan dapat menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- d. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana dalam meningkatkan potensi diri peserta didik menuju terbentuknya kepribadian dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat.

Faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yaitu Pengeluaran. Pengeluaran adalah perbuatan mengeluarkan harta untuk membeli keperluan yang dibutuhkannya. Setiap manusia mempunyai pengeluaran tetapi jumlahnya berbeda-beda, ada yang pengeluarannya besar

dan ada yang pengeluarannya kecil, besar kecilnya pengeluaran tergantung kebutuhan setiap manusia.

Berdasarkan teori tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi adalah :

1. Tingkat Pendapatan.
2. Tingkat Kekayaan.
3. Jenis Pekerjaan.
4. Tingkat Pendidikan.
5. Tingkat Pengeluaran.

1.3.1.2 Kemampuan Implementor

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu kegiatan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Spesialisasi dan profesionalitas dari masing-masing pegawai tidak akan memberikan pemikiran atas hambatan dan gangguan yang nantinya akan terjadi dalam realisasinya. Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan tingkatan dari tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dan mewujudkan prioritas-prioritas.

Gibson (1990:55) menganalisa bahwa variabel individu yaitu kemampuan tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketrampilan. Di dalam hal ini kemampuan merupakan sifat (bawaan sejak lahir atau dipelajari) yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat mental atau fisik maka ketrampilan dinyatakan sebagai kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan dalam tugas.

Menurut Kast Roosentwight (2007:37), ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja yaitu :

1. Kemampuan interaksi, yang ditunjukkan oleh:
 - a. Kemampuan pegawai untuk berkomunikasi.
 - b. Kemampuan seorang pegawai untuk menciptakan (membentuk) menjaga hubungan kerja dengan pegawai lain.
2. Kemampuan konseptual, yang ditunjukkan oleh:
 - a. Tingkat pendidikan formal yang pernah diterima oleh para pegawai.
 - b. Tingkat pendidikan informal yang pernah diterima oleh para pegawai.
 - c. Tingkat kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan masalah.
3. Kemampuan teknis, yang ditunjukkan oleh:
 - a. Kemampuan seorang pegawai untuk melaksanakan metode kerja sesuai TUPOKSI yang telah ditetapkan.

b. Kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan kantor.

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:151-152), dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilaksanakannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Kemampuan pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang memadai dan didukung dengan ketrampilan, keahlian maupun profesionalisme dalam menjalankan program transmigrasi umum di kota Semarang

- a. Tingkat keahlian pelaksana transmigrasi.
- b. Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap peraturan.
- c. Tingkat penggunaan wewenang pelaksana.
- d. Tingkat penggunaan peralatan oleh pelaksana.

1.4 Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang harus ada. Hasil penelitian yang berupa laporan dapat tidak berarti jika tidak didasarkan pada metode yang benar. Metode dimaksudkan agar sasaran penelitian yang dicapai dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu perlu dipersiapkan metode yang akan digunakan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah suatu model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan atau frekuensi suatu aspek atau fenomena

tertentu dan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

2. Penelitian Eksploratif adalah suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum menemukan hipotesa.
3. Penelitian eksplanatori adalah di dalam penelitian ini masalah penelitiannya dapat dirumuskan lebih jelas dan terperinci, hipotesa dapat dikembangkan.

Penelitian yang dipakai adalah penelitian *Eksplanatori*, dimana di dalam penelitian ini masalah penelitiannya dapat dirumuskan lebih jelas dan terperinci, hipotesa dapat dikembangkan, kemudian menjelaskan hubungan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor terhadap implementasi kebijakan.

1.4.2 Populasi dan Sampel

1.4.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah calon transmigran 2011 yang berasal dari kota Semarang yang berjumlah 136 KK.

1.4.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel digunakan metode *Simple Random Sampling* yaitu teknik penentuan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi.

1.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui dapat menggunakan rumus Slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{136}{1 + (136).(0.01)^2}$$

$$n = \frac{136}{2,8496}$$

$$n = 47,7 = 48$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, misalnya 10 % atau 0,01.

1.4.4 Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berkepentingan di seksi transmigrasi yang berupa jawaban dari pertanyaan wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang dikutip dari dokumen-dokumen yang berasal dari instansi atau unit kerja terkait. Data yang berupa buku pedoman, laporan-laporan, brosur.

1.4.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yang dapat mempermudah pengumpulan data, diantaranya :

1. Wawancara : proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait.
2. Observasi : pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian.
3. Studi Pustaka : pengumpulan data-data dari buku-buku, internet, majalah, tulisan-tulisan serta referensi lain yang relevan dengan tujuan penelitian.
4. Studi Dokumentasi : data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

aktual yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat diperoleh dari objek perpustakaan atau peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Kuesioner : teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan sistematis untuk dijawab oleh responden.

1.4.6 Skala Pengukuran

Pengukuran skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain (Sugiyono, 2004:86) :

1. Untuk jawaban yang sangat mendukung diberi skor 4
2. Untuk jawaban yang mendukung diberi skor 3
3. Untuk jawaban yang kurang mendukung diberi skor 2
4. Untuk jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

1.4.7 Pengolahan Data

Proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Editing

Memeriksa kuesioner karena dalam pengisian kuesioner dimana kemungkinan data belum lengkap atau terjadi kesalahan.

2. Koding

Proses pemberian kode terhadap aneka ragam jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama.

3. Tabulasi

Kegiatan pengelompokan jawaban dan perhitungan serta penjumlahan dalam suatu tabel sehingga akan didapatkan hubungan antara variabel yang ada. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal angka yang menunjukkan suatu posisi dalam suatu urutan dalam suatu seri.

1.4.8 Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu *statistik deskriptif* dan *statistik inferensial*. Statistik inferensial meliputi *statistik parametris* dan *statistik nonparametris*.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata standar deviasi, perhitungan prosentase. Di dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

Statistik inferensial, (sering juga disebut *statistik induktif* atau *statistik probabilitas*), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

1.4.9 Pengujian Hipotesis

Teknik Pengujian Hipotesa

Pengujian hipotesis ini menggunakan rumus-rumus sebagai berikut :

a. Koefisien Korelasi rank Kendall

Pada dasarnya rumus ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel Kondisi sosial ekonomi (X_1), variabel Kemampuan implementor (X_2), dengan variabel Implementasi kebijakan (Y) dengan rumus sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$$

Keterangan :

τ = Koefisien Korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Jumlah Responden

Apabila dalam observasi terdapat angka yang sama maka akan digunakan rumus:

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x \cdot (\frac{1}{2}N(N-1)) - T_y}}$$

dimana:

τ = Koefisien Korelasi Rank Kendall

T_x : $1/2t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi yang berangka sama dalam setiap kelompok angka sama pada variabel X

T_y : $1/2t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi yang berjangka sama dalam setiap kelompok angka sama pada variabel Y

S : Skor

N : Jumlah

Untuk menguji signifikan koefisien Kendall tersebut maka diuji dengan rumus :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

di mana :

Z = hasil hitung yang akan dikonsultasikan

τ = koefisien korelasi

N = jumlah responden dalam sampel

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga Z observasi, dimana kriterianya adalah:

1. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $Z_0 < Z_t$ pada taraf signifikan 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

b. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien konkordansi digunakan untuk mengukur derajat asosiasi atau tingkat hubungan antara Kondisi sosial ekonomi (X_1), variabel Kemampuan implementor (X_2), dan variabel Implementasi kebijakan (Y) secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan ranking masing-masing variabel yang diasosiasikan bersama-sama.

Rumus yang digunakan :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}k^2(N^3 - N)}$$

dengan,

$$S = \sum \left(RJ - \frac{\sum RJ}{N} \right)^2$$

Dimana:

S : jumlah kuadrat deviasi observasi dari mean (RJ)

RJ : mean dari ranking

W : koefisien konkordansi

K : banyaknya himpunan ranking penjenjangan

$\frac{1}{12} k^2 (N^3 - N)$ = jumlah S yang akan terjadi dengan adanya kecocokan sempurna antara K ranking.

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}k^2(N^3 - N) - k \sum T}$$

dimana :

$$T = \frac{\sum(t^3 - t)}{12}$$

Keterangan :

Σ : Jumlah kelompok angka sama dalam masing-masing k ranking

T: jumlah harga-harga T untuk semua ranking

t : banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

Pengujian taraf signifikan dilakukan dengan cara memasukkan harga

W kedalam rumus *chi square*, yaitu:

$$X^2 = k(N - 1)W$$

Dimana : X^2 : test Chi Square

W : koefisien konkordansi Kendall

K : banyaknya himpunan ranking perjenjang

N : banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga kritik chisquare dengan rumus $df = N - 1$, adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. Apabila $X^2_0 > X^2_1$ pada taraf signifikasi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $X^2_0 > X^2_1$ pada taraf signifikasi 5% berarti signifikasi, hipotesis diterima.

3. Apabila $X^2_0 < X^2_1$ pada taraf signifikan 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

c. Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui berapa persen (%) pengaruh variabel Kondisi sosial ekonomi (X_1), variabel Kemampuan implementor (X_2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel Implementasi kebijakan (Y).

Digunakan Rumus :

$$KD_{XY} = (\tau_{XY})^2 \cdot 100\%$$

$$KD_{X^1X^2Y} = (\tau_{X^1X^2Y})^2 \cdot 100\%$$

Di mana KD = Koefisien Determinan

BAB II

PEMBAHASAN

- 2.1 Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kondisi sosial ekonomi dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum. Variabel kondisi sosial ekonomi yang dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum dan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Korelasi Rank Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh harga Z hitung (3,55) lebih besar daripada harga Z tabel (1,96) pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh kondisi sosial ekonomi (X_1) terhadap implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) dapat diketahui dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 12,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi calon transmigran dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 12,53% dan sisanya (87,47%) dipengaruhi faktor lain.
- 2.2 Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall antara variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), menunjukkan adanya hubungan yang

signifikan antara variable kemampuan implementor dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum. Variabel kemampuan implementor yang dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum dan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Korelasi Rank Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh harga Z hitung (5,35) lebih besar daripada harga Z tabel (1,96) pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh kemampuan implementor (X_2) terhadap implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) dapat diketahui dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 28,52%. Hal ini menunjukkan bahwa variable kemampuan implementor dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 28,52% dan sisanya (71,48%) dipengaruhi faktor lain.

- 2.3 Uji hipotesis dengan menggunakan rumus Konkordasi Kendall antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) , menunjukkan bahwa antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) terdapat hubungan yang signifikan. Antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Koefisien Konkordasi

Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat hitung (65,411) lebih besar dari harga chi kuadrat tabel (5,99), dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh antara kondisi sosial ekonomi (X_1) dan kemampuan implementor (X_2) terhadap implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), dapat digunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi dan variabel kemampuan implementor dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 46,38% dan sisanya (53,62%) dipengaruhi faktor lain.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian data serta pengujian hipotesis yang telah diuraikan di muka, yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Transmigrasi Umum Di Kota Semarang beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kondisi sosial ekonomi dan kemampuan implementor, maka berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) memiliki kategori tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 66,7% responden yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan transmigrasi umum tinggi yakni pada tabel 3.13 rekapitulasi variabel implementasi karena dipengaruhi oleh : kejelasan prosedur transmigrasi umum, kemudahan prosedur pelaksanaan transmigrasi umum, pemahaman calon transmigran, ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, dan dukungan calon transmigran. Namun ada 12,5% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan transmigrasi umum cukup tinggi, karena masih ada kekurangan mengenai kejelasan prosedur, kemudahan prosedur, pemahaman calon transmigran, ketepatan tujuan, pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, pencapaian sasaran.

2. Hasil dari variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) memiliki kategori cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 75,0% responden menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi calon transmigran cukup tinggi yaitu pada tabel 3.25 rekapitulasi variabel kondisi sosial ekonomi, karena terdapat kekurangan pada faktor pendapatan yang diperoleh, kecukupan pendapatan, usaha untuk pendapatan tambahan, kepemilikan rumah, kelayakan rumah yang ditempati, kepemilikan tanah, kesesuaian pekerjaan, penguasaan pekerjaan, pendidikan dan kecukupan semua pendapatan.
3. Hasil dari variabel kemampuan implementor (X_2) memiliki kategori tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 72,9% responden yang menyatakan bahwa kemampuan implementor pada pelaksanaan transmigrasi umum tinggi yaitu pada tabel 3.34 rekapitulasi variabel kemampuan implementor karena dipengaruhi oleh keahlian penyelenggara, kecepatan memberikan pelayanan, kemampuan memberikan pelayanan, kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan wewenang, penggunaan peralatan dan kegunaan peralatan. Namun 10,4% responden menyatakan bahwa kemampuan implementor cukup tinggi karena terdapat kekurangan mengenai kecepatan memberikan pelayanan, dan kemampuan memberikan pelayanan.
4. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kondisi sosial ekonomi dengan variabel

implementasi kebijakan transmigrasi umum. Variabel kondisi sosial ekonomi yang dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum dan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Korelasi Rank Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh harga Z hitung (3,55) lebih besar daripada harga Z tabel (1,96) pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh kondisi sosial ekonomi (X_1) terhadap implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) dapat diketahui dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 12,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi calon transmigran dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 12,53% dan sisanya (87,47%) dipengaruhi faktor lain.

5. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Korelasi Rank Kendall antara variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kemampuan implementor dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum. Variabel kemampuan implementor yang dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum dan kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Korelasi Rank Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh harga Z hitung (5,35) lebih besar daripada harga Z tabel (1,96) pada taraf signifikan

5%. Dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh kemampuan implementor (X_2) terhadap implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) dapat diketahui dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 28,52%. Hal ini menunjukkan bahwa variable kemampuan implementor dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 28,52% dan sisanya (71,48%) dipengaruhi faktor lain.

6. Uji hipotesis dengan menggunakan rumus Konkordasi Kendall antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) , menunjukkan bahwa antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y) terdapat hubungan yang signifikan. Antara variabel kondisi sosial ekonomi (X_1) dan variabel kemampuan implementor (X_2) dikorelasikan dengan variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), kemudian dihitung dengan menggunakan rumus statistik Koefisien Konkordasi Kendall dengan uji signifikan 5% diperoleh nilai chi kuadrat hitung (65,411) lebih besar dari harga chi kuadrat tabel (5,99), dengan demikian hipotesis tersebut **dapat diterima** secara signifikan. Selanjutnya besarnya pengaruh antara kondisi sosial ekonomi (X_1) dan kemampuan implementor (X_2) terhadap

implementasi kebijakan transmigrasi umum (Y), dapat digunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) yang menghasilkan nilai KD sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi dan variabel kemampuan implementor dapat berpengaruh terhadap variabel implementasi kebijakan transmigrasi umum sebesar 46,38% dan sisanya (53,62%) dipengaruhi faktor lain.

3.2 Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan dan kesimpulan seperti di atas mengenai implementasi kebijakan Transmigrasi Umum di Kota Semarang, maka penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun menyempurnakan implementasi program pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Transmigrasi Umum di kota Semarang dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :
 - a. Prosedur pelaksanaan Transmigrasi Umum diharapkan ada penjelasan secara lisan, supaya calon transmigran yang tidak bisa membaca bisa mengerti prosedurnya.
 - b. Syarat-syarat di dalam prosedur pelaksanaan Transmigrasi Umum hendaknya tidak menyulitkan calon transmigran.
 - c. Bahasa di dalam prosedur pelaksanaan Transmigrasi Umum

hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

- d. Memberikan pelatihan kepada transmigran supaya transmigran berhasil dalam transmigrasi.
 - e. Memberikan motivasi kepada transmigran supaya tidak takut gagal, mau bekerja keras untuk menjadi transmigran yang berhasil.
 - f. Agar program menjadi lebih tepat sasaran, hendaklah proses untuk seleksi calon transmigran lebih diperketat lagi, supaya calon transmigran yang sekiranya mampu mencari pekerjaan yang lebih layak tidak diikut sertakan dalam transmigrasi, karena masih banyak calon transmigran yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
 - g. Mengutamakan tempat permukiman transmigrasi yang banyak diinginkan oleh transmigran, supaya banyak transmigran yang bisa diberangkatkan.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan kondisi sosial ekonomi dalam program kebijakan Transmigrasi Umum di kota Semarang dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :
- a. Di tempat permukiman transmigrasi, transmigran diberikan modal untuk memulai usaha yang telah direncanakan.
 - b. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada transmigran, supaya transmigran dapat melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

- c. Di tempat permukiman transmigrasi, transmigran diberikan rumah yang tetap untuk mereka tempati.
 - d. Di tempat permukiman transmigrasi, transmigran diberikan rumah yang layak untuk mereka tempati.
 - e. Di tempat permukiman transmigrasi, transmigran diberikan tanah untuk diolah oleh transmigran.
 - f. Di tempat permukiman transmigrasi, transmigran diberikan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan mereka sebelumnya.
 - g. Memberikan pelatihan kepada transmigran mengenai pekerjaan mereka supaya mereka menguasai pekerjaan mereka.
 - h. Di tempat permukiman transmigrasi, didirikan sekolah supaya tingkat pendidikan mereka lebih tinggi.
 - i. Memberikan motivasi kepada transmigran, supaya transmigran mau bekerja keras untuk mencapai hasil yang mereka inginkan.
3. Untuk meningkatkan keberhasilan kemampuan implementor program kebijakan transmigrasi umum di kota Semarang dapat dilakukan beberapa upaya seperti berikut ini :
- a. Menambah jumlah orang yang melayani masyarakat, sehingga penyelenggara tidak merangkap tugas, jadi bisa lebih fokus dan lebih cepat dalam melayani masyarakat.
 - b. Memberikan pelatihan untuk Penyelenggara, supaya lebih profesional, mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Warsito, Rukmadi dkk. 1995. *Transmigrasi, dari daerah asal sampai benturan budaya di tempat pemukiman*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Haris, Abdul dan Nyoman Adika. 2002. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, dari perpektif makro ke realitas mikro*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D. Bandung:
Alfabeta.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

Lawang, Robert. 1987. Pengantar Sosiologi. Ut. Jakarta: Balai Pustaka.

James L. Gibson, dkk. 1990. *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*. Jakarta:
Erlangga.

Kast, Fremont E dan James E. Rosenzweig. 2007. *Organisasi dan Manajemen : jilid*
I. Jakarta : Bumi Aksara

Sumber lain : Brosur Program Transmigrasi dari Pemerintah Kota Semarang; Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.